



Analisis Indikator Kinerja Utama
Kelautan dan Perikanan Indonesia

PDB PERIKANAN

Pusat Data, Statistik dan Informasi
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2017





Pusat Data, Statistik dan Informasi
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2017

ISBN 978-602-1278-18-5



9 786021 278185



Analisis Indikator Kinerja Utama
Kelautan dan Perikanan Indonesia

PDB PERIKANAN

Pusat Data, Statistik dan Informasi
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2017





**Analisis Indikator Kinerja Utama Kelautan
dan Perikanan Indonesia: PDB PERIKANAN**

Naskah

Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Pengarah

Dr. Budi Sulistiyo, M.Sc.

Penanggung Jawab

Ismayanti, DFM., DEA.

Editor

1. Rennisca Ray Damanti, S.Pi., MA., M.Eng.
2. Dhina Arriyana, S.Si.
3. Rikrik Rahadian, ME.

Penyusun

Dr. Ir. Soen'an Hadi Poernomo, M.Ed

Publikasi

Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Ukuran Buku

18,5 cm x 26 cm

Jumlah Halaman

x + 38 Halaman

ISBN : 978-602-1278-18-5

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karuniaNya, maka telah tersusun buku “Analisis Data PDB Perikanan Tahun 2017”.

Buku Analisis Data PDB Perikanan tahun 2017 ini menyajikan penjelasan atau analisis diskriptif sederhana mengenai sebagian indikator ekonomi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yakni yang terkait dengan PDB Perikanan 2017 (Nominal), dan dilengkapi dengan PDB Satelit Kelautan dan Perikanan 2017.

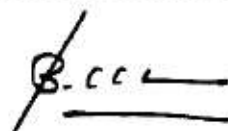
Penerbitan buku ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk digunakan sebagai salah-satu bahan penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi. Buku ini tentu berfungsi pula sebagai informasi bagi pelaku usaha dan masyarakat lainnya.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dengan kebijakan sektor kelautan dan perikanan. Kritik ataupun saran akan dijadikan bahan masukan yang sangat berharga guna peningkatan kualitas publikasi selanjutnya.

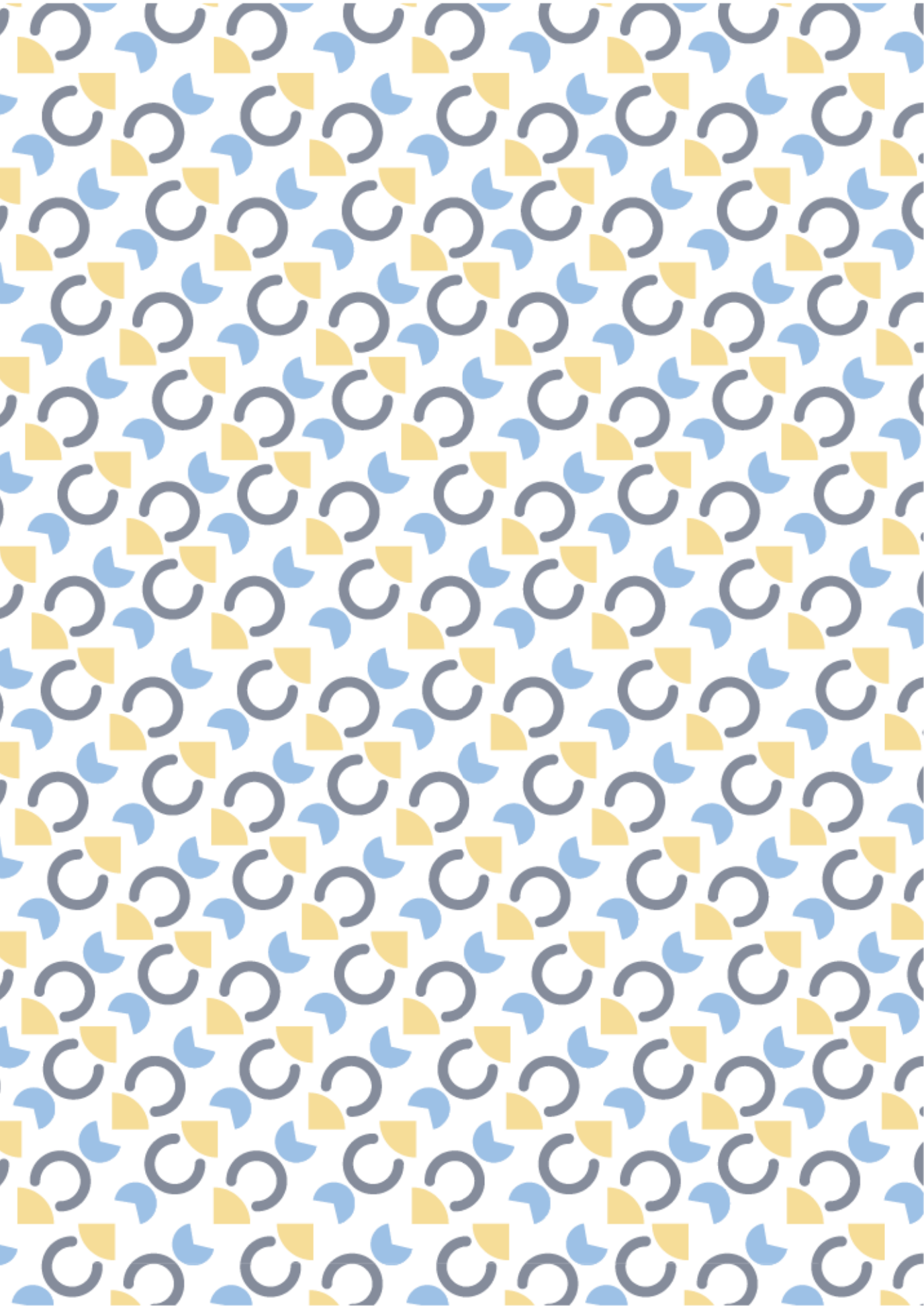
Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusi, baik tenaga maupun pikiran, sehingga buku ini dapat tersusun dan diterbitkan

Jakarta, Desember 2017

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi,



Budi Sulistiyo



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan	2
BAB II METODOLOGI	3
Definisi	3
BAB III PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) PERIKANAN 2017	5
Peran terhadap PDB Nasional	5
PDB Perikanan dan Nilai Produksi	10
Hasil Analisis	12
BAB IV PDB SATELIT KELAUTAN DAN PERIKANAN 2017	13
Lapangan Usaha PDB Satelit KP	16
Hasil Perikanan Komoditas Utama	25
Hasil Analisis	27
BAB V PENUTUP	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kontribusi PDB Perikanan ADHB terhadap PDB Nasional ADHB, 2011 - 2017	8
Tabel 2. Kontribusi PDB Perikanan ADHK terhadap PDB Nasional ADHK, 2011 - 2017	9
Tabel 3. PDB Perikanan (RP. Milyar) dan Produksi Perikanan (1.000 Ton)	10
Tabel 4. Nilai Produksi Perikanan 2014	11
Tabel 5. PDB Satelit Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku, 2013 - 2015	14
Tabel 6. Sepuluh Provinsi dengan Nilai Produksi Perikanan Tertinggi, 2015	15
Tabel 7. Sepuluh Provinsi dengan Nilai Produksi Perikanan Paling Rendah, 2015	16
Tabel 8. Hasil Susenas Komoditas Perikanan 2015	26
Tabel 9. Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas 2015 ..	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan PDB Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), 2011 – 2017	5
Gambar 2. Perkembangan PDB Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), 2011 – 2017	6
Gambar 3. Volume Produksi Sektor Perikanan 2014	11
Gambar 4. Nilai Produksi Sektor Perikanan 2014	12
Gambar 5. Perkembangan PDB Satelit Kelautan dan Perikanan, 2011 - 2015	15
Gambar 6. Lapangan Usaha PDB Satelit KP 2015	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai Produksi menurut Provinsi tahun 2015 (Rp. Miliar)	32
Lampiran 2. Jumlah Nelayan menurut Provinsi tahun 2015	34
Lampiran 3. Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya menurut Provinsi tahun 2015*)	36

RINGKASAN EKSEKUTIF

Analisis data ini mencakup dua pembahasan secara analisis deskriptif sederhana, mengenai Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan--Nominal, serta PDB Satelit Kelautan dan Perikanan (PDB Satelit KP) tahun 2017 dan tahun sebelumnya, disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada.

PDB Perikanan

PDB Perikanan (Nominal) merupakan bagian dari PDB Nasional yang menyajikan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha pada bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya. PDB Perikanan pada tahun 2017 yang bernilai Rp 339.532 milyar, adalah 2,58% dari PDB Nasional yang berjumlah Rp 13,187,7 triliun; dan 11,025% dari Kelompok Lapangan Usaha/Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang nilai PDBnya Rp 1.814,3 triliun. Apabila dibandingkan dengan PDB Perikanan tahun 2016, mengalami kenaikan 6,81%.

PDB Perikanan yang dihitung dari nilai produksi, sebagai contoh uraian tahun 2014, perikanan tangkap (45,84%) dan perikanan budidaya (54,16%), memang sedikit lebih besar porsinya pada perikanan budidaya. Kegiatan yang paling menonjol hasilnya dari keseluruhan jenis nilai produksi adalah perikanan tangkap di laut (42,19%), disusul perikanan budidaya di tambak air payau (20,59%), budidaya air tawar di kolam (15,25%), dan budidaya di laut (10,80%)—terutama komoditas rumput laut (9,92%). Adapun lainnya, termasuk perikanan tangkap di perairan umum, jarring apung, mina padi, dan lain-lain—11,17%.

PDB Satelit Kelautan dan Perikanan

PDB Satelit KP memberikan informasi jumlah nilai tambah yang lebih utuh, karena mencakup seluruh lapangan usaha yang ada di sektor kelautan dan perikanan, termasuk produksi hulu perikanan itu sendiri (perikanan tangkap dan budidaya), pengolahan hasil perikanan, perdagangan besar dan eceran, ekstraksi garam, konstruksi, dan jasa wisata tirta.

PDB Satelit Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 yang bernilai Rp 405.437 milyar, adalah 3,51% dari PDB Nasional yang berjumlah Rp 11.540.790. Apabila dibandingkan dengan PDB Satelit KP tahun 2014, mengalami kenaikan 18,42%. Lapangan usaha yang memiliki bagian terbesar adalah pada lapangan usaha Perikanan, yakni 72,05%, dengan nilai Rp 292.136 milyar; Disusul dengan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran 20,46% (Rp 82.943 milyar); Industri

Pengolahan Hasil Perikanan 7,04% (Rp 28.544 milyar); Jasa Wisata Tirta 0,17% (Rp 696 milyar); serta Ekstraksi Garam 0,15% (Rp 631 milyar), dan Konstruksi 0,12% (Rp 487 milyar).

Masing-masing kelompok lapangan usaha tersebut memiliki kondisi yang berbeda:

- a. **Perikanan:** Meskipun sudah bernilai tinggi dan setiap tahun masih mengalami peningkatan, namun harus disertai dengan paradigma keberlanjutan (*sustainability*). Kegiatan produksi harus disertai pengendalian;
- b. **Perdagangan Besar dan Eceran:** Peluang penyediaan hasil produksi dan konsumen masih tersedia dan setiap tahun menunjukkan selalu terjadi peningkatan. Namun perbandingan dengan volume produksi di lapangan usaha bagian hulu—perikanan tangkap dan budidaya, masih sangat jauh, perlu diupayakan biaya transportasi yang terjangkau dan dukungan sarana-prasarana;
- c. **Industri Pengolahan Hasil Perikanan:** Kesenjangan antara produksi ikan segar dan industri pengolahan menunjukkan kurangnya upaya memperoleh nilai tambah. Kiranya perlu dukungan permodalan usaha, sarana-prasarana, penguasaan teknologi, serta keterampilan dan produktivitas sumberdaya manusia;
- d. **Konstruksi:** Walaupun ketersediaan pelabuhan perikanan bagi penangkapan ikan dan saluran air untuk budidaya perikanan merupakan hal yang vital, namun nilai dalam PDB ternyata tidak terlalu tinggi dan fluktuatif. Memang untuk hal tersebut memerlukan biaya tinggi, akan tetapi harus ada kebijakan keberpihakan (*affirmative action policy*);
- e. **Jasa Wisata Tirta:** Negara kepulauan, pantai yang panjang, cuaca hangat sepanjang tahun, dan aneka keindahan pulau, pantai, alam bawah air, terumbu karang dan berbagai ikan, merupakan daya tarik yang sangat besar bagi wisatawan. Walaupun setiap tahun mengalami pertumbuhan, namun kecilnya nilai dalam PDB, harus didukung dengan sosialisasi atau promosi, penyediaan sarana-prasarana, dan pramu wisata yang kompeten;
- f. **Ekstraksi Garam:** Ketersediaan lahan pantai, teknologi yang tidak sulit, serta kepastian konsumen merupakan peluang positif bagi industri garam. Namun melihat kecilnya nilai dalam PDB, mungkin disebabkan oleh cuaca (tidak produksi saat musim hujan), permodalan dan teknologi yang sangat sederhana, sarana-prasarana produksi dan distribusi yang tidak memadai.



BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang diamandemen tahun 2000, dalam pasal 25A menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang berciri Nusantara. Hal ini menegaskan bahwa dalam berbagai aspek, termasuk kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, harus memperhatikan atau mempertimbangkan kondisi nyata sebagai negara maritim.

Dalam dimensi ekonomi dan sosial, sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan unsur dominan terhadap perekonomian negara, dan sumberdaya manusianya juga tidak terlepas dari aspek kemaritiman. Oleh karenanya, melihat Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan merupakan salah satu instrumen yang cukup penting guna melihat posisi perekonomian negara.

Latar Belakang

Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomer 17 tahun 2007, adalah 'Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional', dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, serta membangun bekonomi secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kerangka pencapaian tujuannya dirumuskan lebih lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara ;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya ;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan ;

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya ;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia ;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga Indonesia bisa maju dan bangkit bersama-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik ;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa ;
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan agenda tersebut, yang terkait langsung dengan bahasan mengenai PDB Perikanan adalah prioritas pembangunan nomor 3, 5, 6 dan 7.

Atas dasar misi RPJPN 2005-2025 tersebut diatas, yang juga kemudian menjadi visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta berdasarkan pada RPJMN 2015-2019, maka Kementerian ini menetapkan misi pembangunannya berpilar pada tiga hal pokok, yakni Kedaulatan (*Sovereignty*), Keberlanjutan (*Sustainability*) dan Kesejahteraan (*Prosperity*). **Kedaulatan**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya perairan, termasuk dalam mengelola dan memanfaatkannya, sehingga mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. **Keberlanjutan**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berprinsip ramah lingkungan, serta menjaga kelestariannya. Adapun **kesejahteraan**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, PDB Perikanan, tentu lebih berkaitan langsung dengan pilar kesejahteraan, dengan tetap memertimbangkan aspek kedaulatan dan keberlanjutan.

Tujuan

Tujuan analisis data PDB Perikanan ini adalah:

1. Analisis data PDB Perikanan diharapkan menjadi salah satu acuan untuk penetapan kebijakan (*Decision Support System*), baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi, kerja sektor kelautan dan perikanan;
2. Analisis data PDB Perikanan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), investor, dan masyarakat lainnya, sebagai informasi yang lebih lengkap, akurat dan mutakhir;
3. Hasil analisis data PDB Perikanan merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan kelautan dan perikanan.

BAB II

METODOLOGI

Analisa data ini dilakukan dengan metode Analisa Deskriptif Sederhana, terhadap data yang sudah ada dari penyedia data, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). PDB Perikanan dalam analisa diantaranya melihat korelasinya satu sama lain, serta disandingkan pula dengan nilai produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Instrumen yang dipakai adalah Koefisien Korelasi Spearman dan Koefisien Korelasi Pearson, dengan tingkat kepercayaan 95%.

PDB Perikanan merupakan bagian dari PDB Nasional, yang dimasukkan dalam kelompok lapangan usaha (sektor) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Data PDB ini terdiri dari PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDB Perikanan disajikan berupa PDB Perikanan Nominal (yang selanjutnya disebut PDB Perikanan) dan PDB Perikanan Satelit. PDB Perikanan yakni yang digunakan dalam PDB Nasional, hanya diambil dari bidang penangkapan ikan dan budidaya perikanan. Adapun PDB Satelit Perikanan, ditambah dengan bidang kegiatan lain yang masih terkait dengan sektor perikanan, yakni:

- a. Perikanan (Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya);
- b. Ekstraksi Garam;
- c. Industri Hasil Perikanan (Industri Besar dan Sedang/IBS dan Industri Mikro dan Kecil/IMK);
- d. Konstruksi;
- e. Perdagangan Besar dan Eceran (Hasil Perikanan, Hasil Ekstraksi Garam, dan Hasil Industri Pengolahan Perikanan);
- f. Jasa Wisata Tirta.

Definisi

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu lapangan usaha/ sektor/ subsektor tertentu; atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu

lapangan usaha/ sektor/ subsektor pada suatu periode waktu tertentu. Dalam sistem perekonomian negara, perhitungan PDB dihindari terjadinya tumpang-tindih penghitungan, maka masing-masing sektor mencakup pada bidang khusus masing-masing.

Dalam PDB Perikanan yang bersifat nominal, dikhususkan pada bidang produksi penangkapan ikan dan budidaya perikanan. Oleh karenanya, guna melihat nilai obyektif sektor perikanan, maka dilakukan pula penghitungan PDB Satelit, yang mencakup bidang-bidang yang terkait dengan perikanan, namun dalam PDB Nominal dikategorikan dalam sektor lain (industri, perdagangan, dan lain-lain), seperti industri pengolahan hasil perikanan, perdagangan ikan, dan jasa wisata.

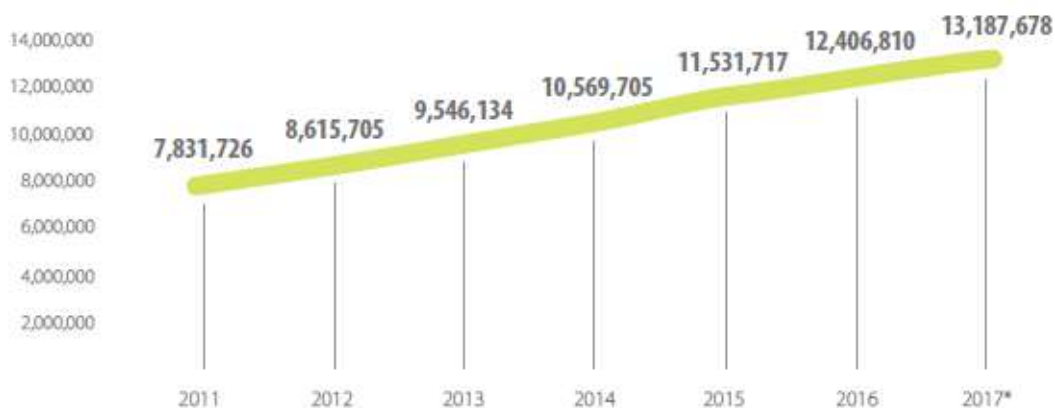
BAB III

PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) PERIKANAN 2017

Produk Domestik Bruto (PDB) Nominal bidang perikanan ini merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu lapangan usaha/ sektor perikanan; atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi perikanan. PDB Perikanan yang merupakan bagian dari PDB Nasional, dimasukkan dalam kelompok lapangan usaha (sektor) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Data PDB ini terdiri dari PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

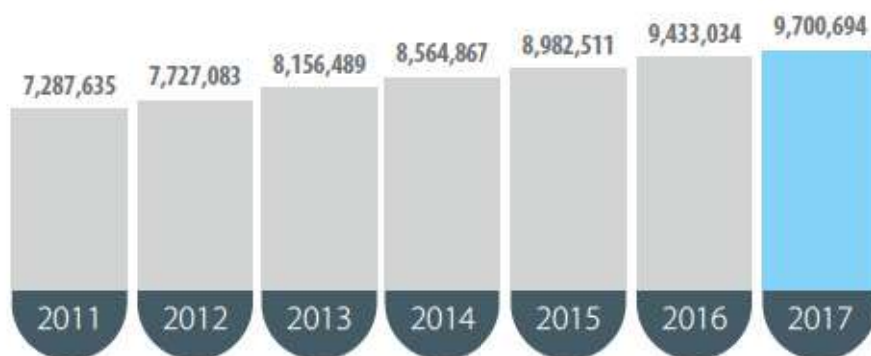
Peran terhadap PDB Nasional

PDB Nasional pada tahun 2017 berdasarkan harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 13.187,7 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, menunjukkan angka Rp 9.700,7 triliun. Pertumbuhannya tidak banyak beda dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 2017 ini sebesar 5,01%, sedangkan tahun 2016 tercatat 5,02%. Sedangkan tahun 2015 memang menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat, yakni 4,79%. Perkembangan PDB Perikanan baik ADHB maupun ADHK seperti dijelaskan di atas, masing-masing dapat diamati pada Gambar 1 dan 2.



Sumber: Pusdatin, 2017

Gambar 1. Perkembangan PDB Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), 2011-2017



Sumber: Pusdatin, 2017

Gambar 2. Perkembangan PDB Perikanan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), 2011 – 2017

Dalam PDB Nominal, PDB Perikanan dimasukkan dalam Kelompok Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kelompok ini tahun 2017 pada hitungan ADHB menunjukkan angka Rp 1.814,3 triliun, atau sekitar 13,76% dari PDB Nasional. Kalau dihitung atas dasar harga konstan, tercatat 1.277,8 triliun. Pertumbuhan tahun 2017 kelompok sektor ini tidak jauh dari PDB Nasional, yaitu 5,07%.

Kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diisi oleh tiga bagian lapangan usaha, yakni yang terbesar adalah Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, bernilai Rp 1.388,6 triliun. Didalamnya terdapat lapangan usaha Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Tanaman Hortikultura, serta Jasa Pertanian dan Perburuan. Disusul kemudian lapangan usaha Perikanan sebesar Rp 339.532 milyar, dan yang terkecil adalah lapangan usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu dengan nilai Rp 86.178 milyar.

Persentase PDB Perikanan terhadap Kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam tahun 2017 ini adalah 11,025%, sedangkan persentasenya terhadap PDB Nasional yaitu 2,58%. Sejak tahun 2011, PDB Perikanan senantiasa mengalami kenaikan, baik nominal maupun persentasenya terhadap PDB Nasional. PDB Perikanan (ADHB) tahun 2011 sebesar Rp 163.484 milyar, tahun 2012 – Rp 184.254 milyar, tahun 2013 – Rp 210.671 milyar, tahun 2014 – Rp 245.488 milyar, tahun 2015 – Rp 288.917 milyar, tahun 2016 – Rp 317.092 milyar, dan tahun 2017 Rp 339.532 milyar.

Dengan hitungan ADHK, PDB Perikanan tahun 2011 adalah Rp 154.545 milyar, tahun 2012 – Rp 164.264 milyar, tahun 2013 – Rp 176.149 milyar, tahun 2014 – Rp 189.090 milyar, tahun 2015 – Rp 204.017 milyar, tahun 2016 – Rp 214.523 milyar, dan tahun 2017 Rp 223.462 milyar.

Persentase terhadap PDB Nasional juga terus meningkat, walaupun tidak begitu besar, yakni pada tahun 2011 persentasenya 2,09%, tahun 2012 – 2,14%, tahun 2013 – 2,21%, tahun 2014 – 2,32%, tahun 2015 – 2,53%, tahun 2016 – 2,56%, dan pada tahun 2017 adalah 2,58%

Tabel 1. Kontribusi PDB Perikanan ADHB terhadap PDB Nasional ADHB, 2011 - 2017

LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	Growth (%)
PDB Nasional	7,831,726	8,615,705	9,546,134	10,569,705	11,531,717	12,406,810	13,187,678	9.64
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,058,245	1,152,262	1,275,048	1,409,656	1,555,747	1,668,998	1,814,298	9.55
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	832,514	902,126	994,778	1,089,550	1,183,971	1,266,361	1,388,588	8.76
a. Tanaman Pangan	270,977	305,671	332,112	343,252	397,409	424,898	503,058	9.50
b. Tanaman Hortikultura	125,286	125,108	137,369	160,569	174,454	186,906	197,094	8.44
c. Tanaman Perkebunan	322,403	323,362	358,172	338,261	405,292	428,682	449,950	7.26
d. Peternakan	117,257	130,614	147,982	167,008	184,152	200,611	211,342	11.35
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	15,591	17,372	19,143	20,460	22,666	24,261	26,338	9.26
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	62,248	65,882	69,599	74,618	82,860	85,545	86,178	6.60
3. Perikanan	163,484	184,254	210,671	245,488	288,917	317,092	339,532	14.20
% PDB Perikanan Terhadap Kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.45	15.99	16.52	17.41	18.57	19.00	18.71	(7.12)
% PDB Perikanan Terhadap PDB Nasional	2.09	2.14	2.21	2.32	2.51	2.56	2.57	4.17
% PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDB Nasional	15.45	15.99	13.36	13.34	13.49	13.45	13.76	2.97

* Angka Sangat Sementara
Sumber: Pusdatin, 2017

Tabel 2. Kontribusi PDB Perikanan ADHK terhadap PDB Nasional ADHK, 2011 - 2017

LAPANGAN USAHA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	Growth (%)
PDB Nasional	7,287,635	7,727,083	8,156,498	8,564,867	8,982,511	9,433,034	9,700,694	5.30
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	993,857	1,039,441	1,083,142	1,129,053	1,171,579	1,209,687	1,277,836	4.01
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	780,581	816,304	847,764	880,390	906,805	935,455	994,532	3.69
a. Tanaman Pangan	250,787	263,076	268,268	268,427	280,019	287,101	338,352	2.76
b. Tanaman Hortikultura	120,079	117,425	118,208	124,301	127,110	130,527	134,902	1.71
c. Tanaman Perkebunan	281,465	301,020	319,533	338,502	345,164	357,235	354,178	4.90
d. Peternakan	113,603	119,250	125,302	132,221	136,936	142,460	147,838	4.63
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	14,646	15,534	16,453	16,938	17,574	18,133	19,264	4.37
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	58,731	58,872	59,229	59,574	60,757	59,709	59,844	0.34
3. Perikanan	154,545	164,264	176,149	189,090	204,017	214,523	223,462	6.78
Pertumbuhan PDB Perikanan	7.65	6.29	7.24	7.35	7.89	5.15	4.17	
Pertumbuhan PDB Kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.95	4.59	4.20	4.24	3.77	3.25	5.63	
Pertumbuhan PDB Nasional	6.17	6.03	5.56	5.01	4.88	5.02	2.84	

* Angka Sangat Sementara
Sumber: Pusdatin, 2017

PDB Perikanan dan Nilai Produksi

PDB Perikanan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha dalam industri perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk memahami PDB Perikanan, dapat dilihat dengan jelas keterkaitannya dengan perkembangan produksi perikanan.

Tabel 3. PDB Perikanan (Rp. Milyar) dan Produksi Perikanan (1.000 Ton)

Tahun	PDB Perikanan	Produksi		
		Total Perikanan	Tangkap	Budidaya
2011	163.484	13.643	5.714	7.929
2012	184.254	15.505	5.829	9.767
2013	210.671	19.416	6.115	13.301
2014	245.488	20.743	6.484	14.359
2015	288.917	22.312	6.678	15.634
2016	317.092	23.506	6.831	16.675

Sumber: Pusdatin 2017

Dalam tabel tersebut terlihat korelasi yang positif perkembangan dari tahun 2011 sampai dengan 2017, antara PDB Perikanan dengan total volume produksi perikanan, maupun produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dalam uji korelasi Pearson, diperoleh korelasi positif yang sangat kuat dengan tingkat kepercayaan 95%, yakni antara nilai PDB Perikanan dengan nilai produksi perikanan secara keseluruhan menunjukkan koefisien korelasi terhitung + 0,961 ; antara PDB Perikanan dengan nilai produksi perikanan tangkap + 0,988 ; dan antara PDB Perikanan dengan nilai produksi perikanan budidaya + 0,974. Semuanya jauh di atas titik kritis 0,754. Sebagai gambaran mengenai proporsi nilai produksi (Rp milyar) perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dapat dilihat di Tabel 4.

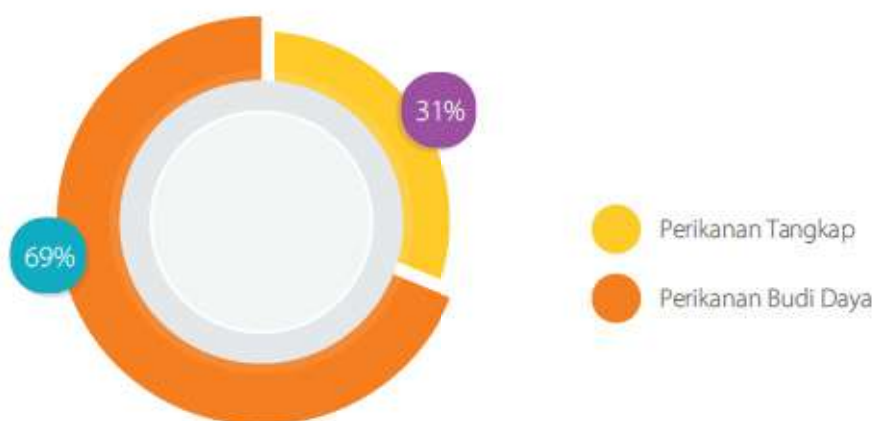
Produksi perikanan lebih banyak dalam jumlah atau volume, maupun nilainya, pada perikanan budidaya (Rp 127,695 milyar- 54,16%) dari pada perikanan tangkap (Rp 108,079 milyar- 45,83%). Perikanan tangkap didominasi oleh usaha perikanan tangkap di laut, yang besarnya 42,19%, dibanding dengan penangkapan ikan di perairan umum, yang hanya 3,65%. Adapun budidaya perikanan banyak dihasilkan oleh kegiatan di tambak air payau (20,59%), disusul budidaya perikanan di kolam air tawar (15,25%), kemudian budidaya perikanan di laut (10,80%), terutama untuk produk rumput laut (9,92%).

Tabel 4. Nilai Produksi Perikanan 2014

(Rp. Milyar)

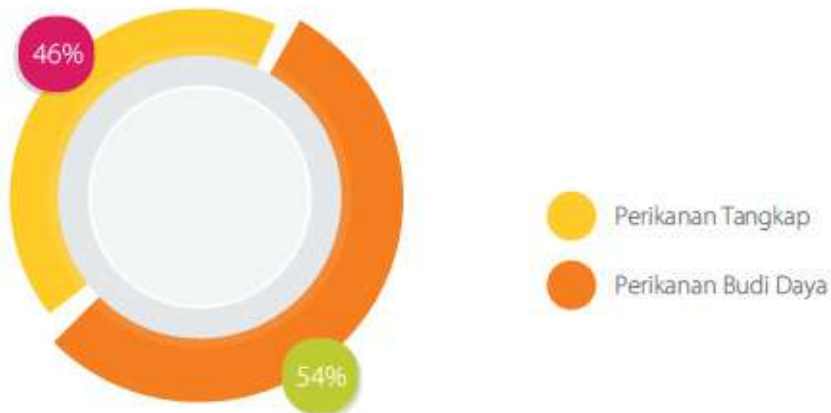
No.	Kegiatan	Jumlah Nilai	Persentase
1.	Perikanan Tangkap	108,079	45.84
	a. Tangkap Laut	99,473	42.19
	b. Tangkap Perairan Umum dan Daratan	8,606	3.65
2.	Perikanan Budidaya	127,695	54.16
	a. Budidaya Laut	25,462	10.80
	- Rumpuk Laut	23,379	9.92
	- Jaring Apung di Laut	1,868	0.79
	- Lainnya	214	0.09
	b. Tambak	48,555	20.59
	c. Kolam	35,945	15.25
	d. Karamba	4,695	1.99
	e. Jaring Apung di Air Tawar	9,054	3.84
	f. Jaring Tancap di Air Tawar	1,225	0.52
	g. Mina Padi	2,758	1.17
Total Nilai Produksi Perikanan		235,774	100.00

Sumber : - DJPB, KKP
- DJPT, KKP



Gambar 3. Volume Produksi Sektor Perikanan 2014

Sumber: Pusdatin, 2017



Gambar 4. Nilai Produksi Sektor Perikanan 2014

Sumber : Pusdatin, 2017

Hasil Analisis

1. PDB Perikanan pada tahun 2017 yang bernilai Rp 339.532 milyar, adalah 2,58% dari PDB Nasional yang berjumlah Rp 13,187,7 triliun; dan 11,025% dari Kelompok Lapangan Usaha/Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang nilai PDBnya Rp 1.814,3 triliun.
2. PDB Perikanan tahun 2017 apabila dibandingkan dengan PDB Perikanan tahun 2016, mengalami kenaikan 6,81%.
3. PDB Perikanan yang dihitung dari nilai produksi perikanan tangkap (45,84%) dan perikanan budidaya (54,16%), memang sedikit lebih besar porsinya pada perikanan budidaya. Kegiatan yang paling menonjol hasilnya adalah perikanan tangkap di laut (42,19%), disusul perikanan budidaya di tambak air payau (20,59%), budidaya air tawar di kolam (15,25%), dan budidaya di laut (10,80%)—terutama komoditas rumput laut (9,92%), serta kegiatan usaha lainnya 11,17%.



BAB IV

PDB SATELIT KELAUTAN DAN PERIKANAN 2017

Salah satu indikator untuk melihat kemampuan sumberdaya ekonomi nasional maupun menurut lapangan usaha atau suatu sektor adalah dengan menggunakan PDB nominal. Dalam sistem penghitungan PDB nominal tersebut, baik atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan, dihindari adanya penghitungan ganda antar berbagai sektor. Sistem tersebut diperlukan, sebab bila terjadi suatu lapangan usaha diperhitungkan lebih dari satu sektor, akan menyebabkan pembengkakan jumlah yang keliru. Akan tetapi, dalam perhitungan PDB nominal terdapat beberapa kegiatan yang terkait dalam suatu sektor, tidak diperhitungkan dalam sektor tersebut, karena terpilih untuk dijadikan bagian dari sektor lain. Dengan demikian, maka PDB yang tertera dalam PDB nominal suatu sektor, tercatat berkurang dari hasil yang sebenarnya.

Untuk memperoleh gambaran nilai ekonomi obyektif suatu sektor, maka dibuatlah perhitungan PDB Satelit yang memuat seluruh kegiatan dalam suatu sektor, tidak dikaitkan dengan akumulasi perhitungan PDB Nasional.

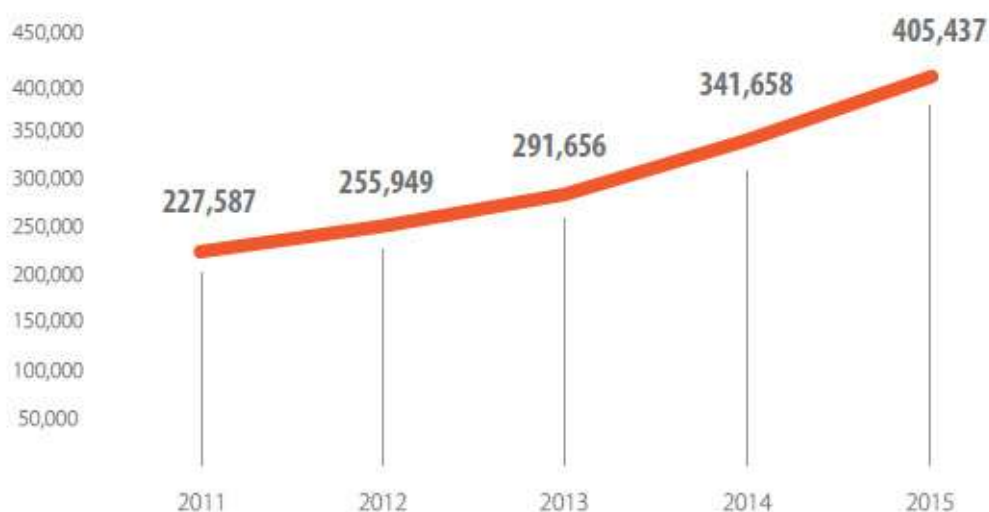
Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghitung PDB Satelit Kelautan dan Perikanan. Data terakhir, tahun 2015, PDB Satelit KP adalah Rp 405.437 miliar. Apabila dibandingkan dengan PDB Nasional 2015, maka persentase PDB Satelit KP terhadap PDB Nasional adalah 3,51%. Pada tahun yang sama, PDB Perikanan (nominal) adalah terhitung Rp 288.917 milyar, atau 2,53% dari PDB Nasional.

Sejak tahun 2011, data PDB Satelit KP senantiasa menunjukkan peningkatan, mulai dari tahun 2011 sebesar Rp 227.587 milyar, tahun 2012 – Rp 255.949 milyar, tahun 2013—Rp 291.656 milyar, tahun 2014 – Rp 341.658 milyar, dan tahun 2015 yaitu Rp 405.437 milyar. Seiring dengan pertumbuhan PDB Nasional, dalam kurun waktu tersebut bahkan PDB Satelit Perikanan menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari persentase peran PDB Satelit KP terhadap PDB Nasional selalu meningkat, tahun 2011 –2,91%, 2012 – 2,97%, tahun 2013 – 3,05%, tahun 2014 – 3,23%, dan tahun 2015 adalah 3,51%. Semua kelompok usaha setiap tahun mengalami peningkatan, kecuali pada kelompok ekstraksi garam dan konstruksi yang mengalami fluktuasi.

Tabel 5. PDB Satelit Kelautan dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku, 2013 – 2015

(RP. MILYAR)

NO.	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	%
A.	Perikanan	210,671.00	245,488.00	292,136.00	72.05
A.1.	Perikanan Tangkap	101,371.00	117,855.00	128,563.00	-
A.2.	Perikanan Budidaya	109,300.00	127,633.00	163,573.00	-
B.	Ekstraksi Garam	213.00	435.00	631.00	0.15
C.	Industri Pengolahan Hasil Perikanan	21,002.00	25,536.00	28,544.00	7.04
C.1.	Industri Besar dan Sedang (SBS)	14,392.00	17,730.00	19,816.00	-
	- Penggaraman, Pengeringan, Pemindangan, Pengasapan, Pemanggang	3,689.00	4,543.00	5,047.00	-
	- Pembekuan, Pendinginan, Pengan	3,472.00	7,303.00	8,172.00	-
	- Pengolahan, Pengawetan, Pengalengan, Fermentasi	6,597.00	5,130.00	5,752.00	-
	- Berbasis Lumatan dan Minyak Ikan	175.00	228.00	269.00	-
	- Pengolahan Garam	376.00	522.00	578.00	-
C.2.	Industri Mikro dan Kecil (IMK)	6,610.00	7,806.00	8,728.00	-
D.	Konstruksi	209.00	74.00	487.00	0.12
E.	Perdagangan Besar dan Eceran	59,061.00	69,530.00	82,943.00	20.46
E.1.	Hasil Perikanan	46,295.00	54,088.00	65,641.00	-
E.2.	Hasil Ekstraksi Garam	27.00	56.00	73.00	-
E.3.	Hasil Pengolahan Perikanan	12,739.00	15,386.00	17,229.00	-
F.	Jasa Wisata Tirta	499.00	595.00	696.00	0.17
	PDB SATELIT KELAUTAN DAN PERIKANAN	291,655.00	341,658.00	405,437.00	
	PDB NASIONAL	9,546,134.00	10,565,817.00	11,540,790.00	
	PERTUMBUHAN PDB SATELIT KP (%)	14.06	17.12	18.42	
	% PDB SATELIT TERHADAP PDB NASIONAL	3.05	3.23	3.51	



Sumber: KPDA 2017, Pusdatin-KKP

Gambar 5. Perkembangan PDB Satelit Kelautan dan Perikanan, 2011 – 2015

Besaran pertumbuhan PDB Satelit KP dari tahun 2011 sampai dengan 2015 walaupun menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2012 sempat mengalami sedikit perlambatan. Pada tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan 14,15%, dalam tahun 2012 pertumbuhannya adalah 12,46%. Pada tahun berikutnya menunjukkan pertumbuhan yang selalu lebih tinggi dengan tahun sebelumnya. Tahun 2013 – 14,06%, tahun 2014—17,12% dan tahun 2015 adalah 18,42%.

Tabel 6. Sepuluh Provinsi dengan Nilai Produksi Perikanan Tertinggi, 2015

(Rp. Milyar)

No.	Provinsi	Perikanan	Provinsi	Tangkap	Provinsi	Budidaya
1.	Jawa Barat	27,419	Sumatera Utara	12,229	Jawa Barat	21,420
2.	Jawa Timur	19,147	Jawa Timur	8,126	Sumatera Selatan	11,595
3.	Sumatera Utara	17,681	Sulawesi Selatan	6,331	Jawa Timur	11,021
4.	Sumatera Selatan	16,617	Jawa Barat	5,999	Nusa Tenggara Barat	8,496
5.	Sulawesi Selatan	15,606	DKI Jakarta	5,978	Jawa Tengah	6,954
6.	Jawa Tengah	10,808	Maluku	5,754	Sulawesi Selatan	6,331
7.	Nusa Tenggara Barat	10,512	Sumatera Selatan	5,021	Maluku	5,754

Lanjutan tabel 6

No.	Provinsi	Perikanan	Provinsi	Tangkap	Provinsi	Budidaya
8.	Sumatera Barat	9,282	alimantan Selatan	4,794	Sumatera Barat	5,668
9	Sulawesi Utara	9,174	Sulawesi Utara	4,601	Sumatera Utara	5,435
10.	Maluku	7,999	Papua Barat	4,431	Kalimantan Selatan	4,794

Tabel 7. Sepuluh Provinsi dengan Nilai Produksi Perikanan Paling Rendah, 2015

(Rp. Milyar)

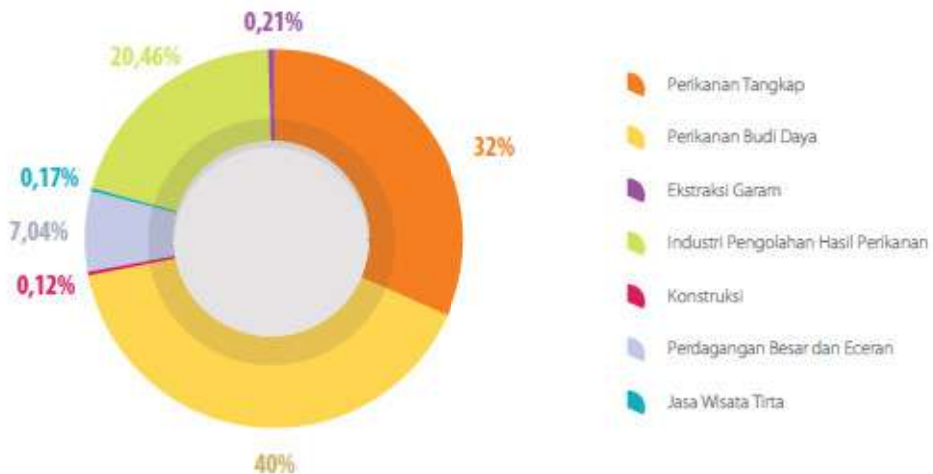
No.	Provinsi	Perikanan	Provinsi	Tangkap	Provinsi	Budidaya
1.	Kalimantan Utara	9.55	DI. Yogyakarta	88	Maluku Utara	110
2.	DI. Yogyakarta	1,272	Kalimantan Utara	496	Bangka Belitung	120
3.	Sulawesi Barat	1,807	Sulawesi Barat	796	Papua Barat	222
4.	Gorontalo	2,148	Gorontalo	1,392	DKI Jakarta	241
5.	Bali	2,287	Bengkulu	1,394	Kalimantan Timur	458
6.	Jambi	2,376	Jambi	1,591	Bali	586
7.	Banten	2,546	Kalimantan Timur	1,685	Kepulauan Riau	606
8.	Papua	3,277	Bali	1,700	Papua	699
9	Kelupauan Riau	3,561	Banten	1,714	Gorontalo	756
10.	Bengkulu	3,680	Nusa Tenggara Timur	1,914	Jambi	785

Lapangan Usaha PDB Satelit KP

PDB Satelit KP dibagi menjadi enam lapangan usaha, yaitu :

1. Perikanan
 - a. Perikanan Tangkap
 - b. Perikanan Budidaya

2. Industri Pengolahan Hasil Perikanan
 - a. Industri Besar dan Sedang (IBS)
 - 1). Penggaraman, pengeringan, pemindangan, pengasapan, pemanggangan
 - 2). Pembekuan, pendinginan, pengesan
 - 3). Pengolahan, pengawetan, pengalengan, fermentasi
 - 4). Berbasis lumatan dan minyak ikan
 - 5). Pengolahan garam
 - b. Industri Mikro dan Kecil (IMK)
3. Perdagangan Besar dan Eceran
 - a. Hasil Perikanan
 - b. Hasil Pengolahan Perikanan
 - c. Hasil Ekstraksi Garam
4. Ekstraksi Garam
5. Konstruksi
6. Jasa Wisata Tirta



Sumber: KPDA 2017, Pusdatin-KKP

Gambar 6. Lapangan Usaha PDB Satelit KP 2015

Dalam PDB Satelit KP ini sebagian besar adalah hasil dari lapangan usaha perikanan, yakni Rp 292.136 milyar, atau 72,05%. Disusul oleh kegiatan perdagangan besar dan eceran Rp 82.943 milyar (20,46%), dan industri pengolahan hasil perikanan Rp 28.544 milyar (7,04%). Lapangan usaha lainnya sangat kecil, yakni konstruksi (0,12%), jasa wisata tirta (0,17%) dan ekstraksi garam (0,15%)

Dari kondisi data antar kelompok lapangan usaha ini terlihat bahwa kegiatan produksi penangkapan ikan dan budidaya sebagai kegiatan “hulu”, jauh lebih besar dari pada kegiatan perdagangan yang berada di “tengah”, dan yang terendah yaitu pada industri, sebagai posisi “hilir”. Besarnya kelompok produksi (72,03%) dapat difahami, karena potensi sumberdaya alam, berupa laut yang luas, pantai yang panjang, serta lahan dan sumberdaya manusia yang tersedia, menghasilkan nilai ekonomis secara kuantitatif sangat besar. Namun produksi sumberdaya alam yang tinggi ini hendaknya senantiasa diiringi dengan paradigma yang mempertimbangkan pelestarian sumberdaya alam, atau keberlanjutan (*sustainability*).

Kegiatan perdagangan (20,36%) yang posisinya cukup tinggi, namun masih jauh dari kegiatan produksi, menunjukkan terdapatnya peluang sekaligus hambatan. Peluang yang ada, yakni tersedianya produk yang diperdagangkan, serta konsumen yang menerima, baik domestik maupun ke luar negeri. Namun kendala yang banyak dijumpai dalam perdagangan adalah kurangnya fasilitas mendukung perdagangan, distribusi dan pemasaran, serta mahalnya biaya transportasi—terutama antar pulau dan yang jauh ke pedalaman. Hambatan yang bersifat alami adalah sifat produk perikanan yang mudah mengalami kemunduran mutu (*perishable food*).

Kegiatan yang dalam posisi terakhir, atau relatif paling kecil adalah sektor industri (7,23%). Dalam sistem perekonomian, sebaiknya posisi “hilir” ini menjadi yang terbesar, karena banyak memberikan nilai tambah, sehingga banyak memberikan sumbangan kepada pelaku usaha, masyarakat dan negara. Namun kenyataannya yang masih rendah, menunjukkan masih perlu untuk ditingkatkan. Tantangan yang harus dihadapi, atau solusi yang harus diupayakan pemecahannya adalah keterbatasan modal, kurangnya sarana dan prasarana, penguasaan teknologi, atau lemahnya kualitas sumberdaya manusia, baik ketrampilan atau tingkat produktivitasnya. Namun dibalik kekurangan itu semua, mungkin juga disebabkan oleh keunikan ekonomis produk perikanan yang bersifat positif, yakni kondisi produk yang paling bernilai ekonomis tinggi adalah justru saat segar, belum diolah.

1. Perikanan



Sumber : www.pemudamaritim.com

Kelompok lapangan usaha Perikanan terdiri dari kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Lapangan usaha yang paling dominan dalam PDB Satelit KP ini adalah kegiatan budidaya perikanan, pada tahun 2015 menghasilkan Rp 163.573 milyar, atau 55,99% dari nilai lapangan usaha Perikanan, dan 40,34% dari nilai PDB Satelit KP. Data series 2011-2015 menunjukkan kegiatan budidaya perikanan menghasilkan nilai ekonomis yang selalu meningkat. Tahun 2011 memberikan Rp 77.273 milyar, tahun 2012 – Rp 92.169 milyar, tahun 2013 – Rp 109.300 milyar, tahun 2014 – Rp 127.633 milyar, dan tahun 2015 sebesar Rp 163.573 milyar.

Sebagai negeri yang memiliki pantai terpanjang di dunia, dari lapangan usaha ini yang paling banyak menghasilkan adalah dari tambak budidaya air payau, menghasilkan terutama udang dan bandeng. Berikutnya adalah dari kolam air tawar, seperti budidaya ikan patin, ikan gurame, ikan mas dan nila. Selanjutnya adalah budidaya laut, terutama rumput laut, dan sedikit ikan kerapu.



Sumber : suburonlineblog.wordpress.com

Kegiatan satunya adalah perikanan tangkap, yang pada tahun 2015 bernilai Rp 128.563 milyar, atau 44,01% dari nilai lapangan usaha Perikanan, atau 31,71% dari keseluruhan nilai PDB Satelit KP. Usaha perikanan tangkap ini dalam data 2011-2015 setiap tahun selalu menunjukkan perkembangan. Tahun 2011 menghasilkan Rp 86.211 milyar, tahun 2012 – Rp 92.085 milyar, tahun 2013 – Rp 101.371 milyar, tahun 2014 – Rp 117.855 milyar, dan tahun 2015 sebesar Rp 128.563 milyar.

Hal ini dapat difahami karena Indonesia sebagai negeri kepulauan dan memiliki kawasan laut yang lebih luas dari daratan. Sebagian besar hasil penangkapan ikan tersebut dari perairan di laut. Industri perikanan memang terdapat beberapa bentuk, tergantung dimensi penggolongannya. Ada yang skala besar, kebanyakan produknya berorientasi ekspor, dan kawasan penangkapan ikannya juga dekat dengan Samudera Pasifik, Samudera Indonesia, Laut Banda, atau Laut Arafura. Produk yang ditangkap kebanyakan tuna, cakalang, udang dan sebagainya.

Terdapat pula yang skala sedang dan kecil, berorientasi pasar domestik, kebanyakan di kawasan Laut Jawa, Selat Karimata atau Selat Makassar. Industri skala ini komoditi yang dihasilkan kebanyakan ikan pelagis kecil, termasuk ikan kembung, lemuru, teri, tongkol, tengiri, rajungan, cumi-cumi dan sebagainya.

Melihat pertumbuhan yang berlangsung setiap tahun, tanpa fluktuasi, menunjukkan kondisi ekonomi yang positif. Akan tetapi karena hal ini menyangkut eksploitasi sumberdaya alam, atau perairan, maka harus senantiasa disertai dengan wawasan, sikap dan perilaku guna menjaga keberlanjutannya (*sustainability*).

2. Perdagangan Ikan



Sumber : www.mediaIndonesia.com

Perdagangan dalam PDB Satelit KP ini meliputi yang perdagangan besar, maupun yang kecil atau eceran, totalnya pada tahun 2015 bernilai Rp 82.943 milyar, atau 20,36% dari nilai PDB Satelit KP. Kegiatan yang cukup besar adalah perdagangan produk hasil perikanan yang masih segar dan perdagangan olahan hasil perikanan. Rantai perdagangan ini tentu sejak ikan didaratkan di pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan ikan. Setelah mengalami pelelangan ataupun langsung ke pengumpul, untuk selanjutnya didistribusikan ke konsumen.

Perdagangan produk segar hasil perikanan, baik yang skala besar maupun eceran, sejak tahun 2011 hingga 2015 senantiasa mengalami peningkatan nilai. Tahun 2011 bernilai Rp 35.909 milyar, tahun 2012 – Rp 40.535 milyar, tahun 2013 – Rp 46.295 milyar, tahun 2014 – Rp 54.088 milyar, dan tahun 2015 adalah Rp 65.641 milyar, atau 79,14% dari kelompok lapangan usaha perdagangan ikan, dan 16,19% dari nilai total PDB Satelit KP.

Perdagangan produk perikanan yang sudah diolah, persentasenya terhadap kelompok lapangan usaha perdagangan ikan adalah 20,77%, atau 4,25% dari PDB Satelit KP. Pertumbuhannya tahun 2011-2015 secara konsisten selalu mengalami kenaikan, yakni pada tahun 2011 adalah Rp 10.337 milyar, tahun 2012 – Rp 11.380 milyar, tahun 2013 – Rp 12.739, tahun 2014 – Rp 15.386, dan tahun 2015 adalah Rp 17.229 milyar.

Kegiatan perdagangan yang setiap tahun mengalami pertumbuhan, menunjukkan adanya kondisi ekonomi yang positif, sekaligus optimis, baik dari sisi ketersediaan produk, maupun keberadaan konsumen di dalam negeri, maupun untuk ekspor. Akan tetapi bila dibandingkan dengan kegiatan produksi, masih jauh di bawahnya. Kemungkinan kendala yang mengurangi kinerja sektor perdagangan adalah sistem di tempat pemasaran yang kurang kondusif, sehingga menuntut pengeluaran biaya yang tidak dikehendaki, kurangnya sarana-prasarana pendukung, distribusi dan pemasaran, serta mahal biaya transportasi dari tempat pendaratan ikan ke lokasi konsumen—terutama antar pulau dan yang jauh ke pedalaman. Hambatan yang bersifat alami adalah sifat produk perikanan yang mudah mengalami kemunduran mutu (*perishable food*), sehingga memerlukan penanganan khusus.

Perdagangan lainnya berupa hasil ekstraksi garam, tercatat kurang signifikan dan fluktuatif. Mungkin karena sangat terpengaruh oleh musim, ataupun lokasi berproduksi yang seringkali jauh dari konsumen. Faktor sistem perdagangan yang kurang menguntungkan produsen dan konsumen juga perlu diperbaiki. Nilai yang tercatat menunjukkan sangat fluktuatif dari Rp 27 milyar sampai tertinggi hanya Rp 73 milyar.

3. Industri Pengolahan Hasil Perikanan



Sumber : news.kkp.go.id

Industri pengolahan hasil perikanan ini digolongkan menjadi dua kelompok, yakni Industri Besar dan Sedang (IBS), yang termasuk didalamnya industri pengolahan ikan bertujuan ekspor. Golongan satunya lagi adalah Industri Mikro dan Kecil (IMK), termasuk di dalamnya adalah industri pengolahan ikan skala rumah tangga.

Kelompok lapangan usaha ini pada tahun 2015 bernilai Rp 28.544 milyar atau 7,23% dari total nilai PDB Satelit KP. Industri yang tergolong besar dan sedang, menyumbang Rp 19.816 milyar, atau persentasenya 69,42% dari kelompok Industri Pengolahan Hasil Perikanan, dan 4,89% dari PDB Satelit KP. Dari kelompok ini, nilai yang terbesar adalah kegiatan industri pembekuan, pendinginan dan pengesakan ikan, yaitu Rp 8.172 milyar, atau 28,68% dari nilai industri pengolahan. Disusul oleh industri pengolahan, pengalengan, pengawetan dan fermentasi, sebesar Rp 5.752 milyar, atau 20,15% dari industri pengolahan. Industri penggaraman, pengeringan, pemindangan, pengasapan dan pemanggangan senilai Rp 5.047 milyar, atau 17,68% dari industri pengolahan. Yang kecil dalam golongan ini adalah industri berbasis lumatan daging ikan dan minyak ikan, serta pengolahan garam. Masing-masing adalah Rp 269 milyar dan Rp 578 milyar.

Nilai tambah yang tercatat pada tahun 2015 dalam PDB Satelit KP dari kelompok Industri Mikro dan Kecil (IMK) adalah Rp 8.728 milyar. Persentase nilai kelompok ini 30,58% dari nilai kelompok Industri Pengolahan Hasil Perikanan, atau 2,15% dari nilai PDB Satelit KP.

Pertumbuhan dari tahun 2011 sampai dengan 2015, industri dalam kategori IBS maupun IMK, keduanya memiliki pertumbuhan yang signifikan dan selalu meningkat. Industri Besar dan Sedang pada tahun 2011 menyumbang Rp 11.795 milyar, tahun 2012 – Rp 18.806 milyar, tahun 2013 – Rp 14.392 milyar, tahun 2014 – Rp 17.730 milyar, dan tahun 2015 senilai Rp 19.816 milyar. Begitu pula Industri Mikro dan Kecil, pada tahun 2011 sebesar Rp 5.390 milyar, tahun 2012 – Rp 6.033 milyar, tahun 2013 – Rp 6.610 milyar, tahun 2014 – Rp 7.806 milyar, dan tahun 2015 sebanyak Rp 8.728 milyar.

Kegiatan lapangan usaha industri pengolahan hasil perikanan merupakan hal yang strategis dan seharusnya banyak memberikan nilai tambah. Pertumbuhannya setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga memberikan indikasi bahwa kondisi ekonomisnya positif dan optimis. Namun apabila dibandingkan dengan ketersediaan bahan baku dari penangkapan ikan dan budidaya perikanan, kiranya masih dapat dianggap masih rendah, dan perlu untuk ditingkatkan. Kemungkinan permasalahannya adalah keterbatasan modal, kurangnya fasilitas pendukung, penguasaan teknologi, atau kurangnya ketrampilan atau tingkat produktivitas sumberdaya manusia yang menanganinya, Walaupun memang produk perikanan memiliki keunikan yang mengurangi kebutuhan “industrialisasi”, yakni harganya yang tertinggi justru saat berkualitas segar, atau belum diolah.

4. Ekstraksi Garam, Konstruksi dan Jasa Wisata Tirta

Kontribusi lapangan usaha ekstraksi garam terhadap PDB Satelit KP relatif kecil, yakni pada tahun 2015 hanya 0,12%, yaitu Rp 631 milyar. Pertumbuhannya sejak tahun 2011 juga fluktuatif. Pada tahun 2011 dengan nilai Rp 226 milyar, tahun 2012 – Rp 409 milyar, tahun 2013 – Rp 213 milyar, tahun 2014 – Rp 435 milyar, dan tahun 2015 naik lagi menjadi Rp 631 milyar.

Sebagai negeri kepulauan terbesar di dunia, pantainya juga termasuk yang terpanjang, dengan iklim tropis yang hangat sepanjang tahun, garam merupakan produk ekonomis yang cukup strategis dan menjanjikan, Konsumen garam juga sangat luas, karena dibutuhkan oleh setiap orang, bahkan juga merupakan komoditi untuk bahan baku industri. Hanya permasalahannya juga tidak sederhana, ada beberapa hal yang perlu dicarikan solusinya. a. Kebanyakan petani garam adalah masyarakat tradisional dan ekonomi lemah, sehingga permodalannya terbatas, serta teknologi yang digunakan juga sangat sederhana. b. Produksi garam banyak tergantung pada musim alami. Saat musim hujan tidak bisa berproduksi, sedangkan saat musim kemarau terjadi kelimpahan produk, sehingga menyebabkan harganya sangat rendah. c. Lokasi produksi garam sering jauh dari tempat pemasaran, dengan sarana transportasi yang kurang memadai. Bahkan tidak sedikit, lokasi tambak garam yang sulit untuk menjangkau jalan raya tempat sarana transportasi

“menjemput”nya. d. Karena penggunaan lahan tambak garam lebih menguntungkan untuk kegiatan budidaya ikan (udang, bandeng, rumput laut), maka banyak yang beralih fungsi.



Sumber : beritasatu.com

Lapangan usaha Konstruksi merupakan bagian yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian, juga sosial dan budaya masyarakat. Dalam kegiatan penangkapan ikan, jasa konstruksi yang paling menonjol adalah pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan ikan, termasuk di dalamnya pelelangan ikan dan cold storage, atau tempat penyimpanan produk. Untuk kegiatan budidaya perikanan, aspek konstruksi yang penting adalah sarana saluran air untuk tambak dan kolam.

Kalau dilihat dari besarnya peran konstruksi dalam sektor kelautan dan perikanan, nilai konstruksi pada PDB Satelit KP ini terlalu kecil, dan fluktuatif. Pada tahun 2015 hanya menyumbang 2,23%. Pada tahun 2011 hanya bernilai Rp 31 milyar, tahun 2012 – Rp 75 milyar, tahun 2013 – Rp 209 milyar, tahun 2014 – Rp 74 milyar, dan tahun 2015 kembali terjadi kenaikan, yakni Rp 487 milyar.

Fungsi pelabuhan perikanan sangat penting guna pendaratan kapal penangkap ikan, pembongkaran ikan dari kapal, pelelangan dan pemasaran ikan, pengolahan dan penyimpanan produk atau bahan mentahnya, tempat pelayanan logistik, bahan bakar, maupun administrasi dan sebagainya. Bahkan pada lokasi atau pulau terpencil,

merupakan faktor utama bagi berlangsungnya perekonomian dan kehidupan di kawasan tersebut. Oleh karenanya, sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara, pembangunan konstruksi bagi kebutuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat, harus menggunakan kebijakan “*affirmative action*” atau keberpihakan, yang tidak menghitung untung-rugi. Hanya perlu dihindari pembangunan konstruksi atau infrastruktur yang tanpa perhitungan cermat, sehingga setelah dibangun ternyata tidak berfungsi.

Jasa Wisata Tirta seharusnya merupakan sektor yang sangat besar di negeri yang memiliki belasan-ribu pulau, puluhan-ribu kilometer panjang pantai, serta hangat sepanjang tahun. Banyak pantai, pulau dan alam bawah laut yang indah, dengan aneka warna dan jenis ikan, serta terumbu karang. Kalau melihat peluang yang dimiliki, nilai lapangan usaha Jasa Wisata Tirta dalam PDB Satelit KP adalah masih relatif kecil, yakni tahun 2015 hanya 0,17% atau Rp 696 milyar. Akan tetapi pertumbuhannya yang secara konsisten terus meningkat, maka memberikan optimisme untuk dapat dikembangkan. Pada tahun 2011 lapangan usaha ini menyumbang Rp 385 milyar, tahun 2012 – Rp 438 milyar, tahun 2013 – Rp 499 milyar, tahun 2014 – Rp 595 milyar, dan tahun 2015 sebesar Rp 696 milyar.

Guna mengembangkan sektor ini, perlu diupayakan sosialisasi terhadap masyarakat dan wisatawan, baik di dalam maupun luar negeri, penyediaan sarana transportasi, akomodasi dan restoran kuliner yang baik, pramu wisata yang kompeten, serta sistem administrasi kewisataan yang baik. Dengan adanya kebijakan perluasan bebas visa bagi beberapa negara akhir-akhir ini adalah salah satu upaya yang sangat positif dalam meningkatkan Jasa Wisata Tirta.

Hasil Perikanan Komoditas Utama

Nilai tambah, nilai barang atau jasa yang dominan dalam PDB Satelit adalah kegiatan perikanan, baik untuk konsumsi dalam negeri, maupun diekspor. Berdasarkan Susenas Komoditi Perikanan pada tahun 2015 terhadap 525.171 responden, jenis ikan laut yang tertinggi nilainya adalah kelompok tuna, tongkol dan cakalang (Rp 1.733,42 juta), sedangkan ikan air tawar adalah jenis lele, patin dan sebagainya (Rp 848,93 juta). Adapun nilai ekspor tertinggi, menurut data BPS adalah udang (1.740.525 \$US), disusul tuna, cakalang, tongkol (567.054 \$US), cumi-cumi (337.391 \$US), kepiting dan rajungan (321.846 \$US), serta rumput laut (161.802 \$US).

Tabel 8. Hasil Susenas Komoditas Perikanan 2015

No.	Jenis Ikan	Nilai (Rp. Juta)
1.	Tongkol, Tuna Cakalang	1.733,42
2.	Lele, Pating, Gabus, Belut	848,93
3.	Kembung	779,54
4.	Udang, cumi, sotong, kerang, kepiting, ketam	732,16
5.	Bandeng	590,26
6.	Mujair	589,73
7.	Teri	392,83
8.	Ikan laut segar lainnya	2.179,08
9.	Ikan tawar/ payau segar lainnya	1.013,99
10.	Ikan laut diolah	886,36
11.	Ikan tawar diolah	161,81
12.	Udang dan lain-lain diolah	65,76
13.	Ikan dalam kaleng	120,83
Jumlah		10.094,71

Sumber : Susenas 2015

Tabel 9. Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas 2015

No.	Jenis Ikan	Nilai (US\$)
1.	Udang	1.740.526
2.	Tongkol, tuna, cakalang	567.054
3.	Cumi-cumi dan sebagainya	337.391
4.	Kepiting, rajungan	321.846
5.	Rumpul laut	161.802
6.	Tilapia	71.419
7.	Makerel	54.181
8.	Layur	54.124
9.	Mutiara	45.998
10.	Kerapu	41.267
11.	Lobster	37.965
12.	Sardin	32.405
13.	Lainnya	707.045
Jumlah		3.943.716

Sumber : BPS 2016, diolah

Hasil Analisis

1. PDB Satelit Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 yang bernilai Rp 405.437 milyar, adalah 3,51% dari PDB Nasional yang berjumlah Rp 11.540.790 triliun.
2. PDB Satelit KP tahun 2015 apabila dibandingkan dengan PDB Satelit KP tahun 2014, mengalami kenaikan 18,42%.
3. PDB Satelit KP memiliki bagian yang terbesar pada lapangan usaha Perikanan, yakni 72,05%, dengan nilai Rp 292.136 milyar; Disusul dengan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran 20,36% (Rp 82.943 milyar); Industri Pengolahan Hasil Perikanan 7,23% (Rp 28.544 milyar); Konstruksi 2,23% (Rp 487 milyar); Jasa Wisata Tirta 0,17% (Rp 696 milyar); serta Ekstraksi Garam 0,21% (Rp 631 milyar).
4. Masing-masing kelompok lapangan usaha, memiliki kondisi yang berbeda:
 - a. **Perikanan:** Meskipun sudah bernilai tinggi dan setiap tahun masih mengalami peningkatan, namun harus disertai dengan paradigma keberlanjutan (*sustainability*). Kegiatan produksi harus disertai pengendalian;
 - b. **Perdagangan Besar dan Eceran:** Peluang penyediaan hasil produksi dan konsumen masih tersedia, dan setiap tahun menunjukkan selalu terjadi peningkatan. Namun perbandingan dengan volume produksi agak jauh, perlu diupayakan biaya transportasi yang terjangkau dan dukungan sarana-prasarana;
 - c. **Industri Pengolahan Hasil Perikanan:** Kesenjangan antara produksi ikan segar dan industri pengolahan menunjukkan kurangnya upaya memperoleh nilai tambah. Kiranya perlu dukungan permodalan usaha, sarana-prasarana, penguasaan teknologi, serta ketrampilan dan produktivitas sumberdaya manusia;
 - d. **Konstruksi:** Walaupun ketersediaan pelabuhan perikanan bagi penangkapan ikan dan saluran air untuk budidaya perikanan merupakan hal yang vital, namun nilai dalam PDB ternyata tidak terlalu tinggi dan fluktuatif. Memang untuk hal tersebut memerlukan biaya tinggi, akan tetapi harus ada kebijakan keberpihakan (*affirmative action policy*);
 - e. **Jasa Wisata Tirta:** Negara kepulauan, pantai yang panjang, cuaca hangat sepanjang tahun, dan aneka keindahan pulau, pantai, alam bawah air, terumbu karang dan berbagai ikan, merupakan daya tarik

yang sangat besar. Walaupun setiap tahun mengalami pertumbuhan, namun kecilnya nilai dalam PDB, harus didukung dengan sosialisasi atau promosi, penyediaan sarana-prasarana, dan pramuwisata yang kompeten;

- f. **Ekstraksi Garam:** Ketersediaan lahan pantai, teknologi yang tidak sulit, serta kepastian konsumen merupakan peluang positif bagi industri garam. Namun melihat kecilnya nilai dalam PDB, mungkin disebabkan oleh cuaca (tidak produksi saat musim hujan), permodalan dan teknologi yang sangat sederhana, sarana-prasarana produksi dan distribusi yang tidak memadai.



BAB V

PENUTUP

Analisis Data PDB Perikanan tahun 2017, termasuk PDB Satelit Kelautan dan Perikanan tahun 2017, ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk pertimbangan penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Buku Analisis Data semoga bisa menjadi pilihan referensi bagi masyarakat atau pelaku usaha, memberikan inspirasi dan mendorong gagasan untuk peningkatan kualitas pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Apabila didalam substansi bahasan terdapat ungkapan kelemahan dalam metoda pendataan, kiranya juga dapat menjadi bahan perbaikan guna memperoleh data yang lebih baik pada masa selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Statistik Perikanan Budidaya Indonesia Tahun 2015, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta, 2016
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Peta Sentra Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta, 2016
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Statistik Perikanan Budidaya Indonesia Tahun 2014, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta, 2016
- Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Statistik Perikanan Budidaya Indonesia Tahun 2013, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Jakarta 2015
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Tahun 2015, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta, 2016
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Statistik Perikanan Tangkap di Laut menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) Tahun 2015, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta, 2016
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2014, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta, 2016
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Statistik Perikanan Tangkap Indonesia Menurut Wilayah Pengelolaan Perairan (WPP) Tahun 2014, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Jakarta, 2016
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Statistik Perikanan Tangkap di Laut Menurut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), Direktorat Perikanan Tangkap, Jakarta, 2015
- Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik, Data PDB Triwulanan 2016, Jakarta, 2017
- Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik, Data PDB Triwulanan 2016 (Triwulan III), Jakarta, 2016
- Jakfar dan Khasmir, Studi Kelayakan Bisnis, Prenada Media Kencana, Jakarta, 2003
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015, Jakarta, 2016

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, Jakarta, 2015

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: KEP/25/M. PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, Jakarta, 2004

Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Produk Domestik Bruto Satelit Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2015, Kerjasama BPS dan KKP, Jakarta, 2016

.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai Produksi menurut Provinsi tahun 2015

(Rp. Miliar)

Provinsi	Total Perikanan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya
Sumatera	74.770	40.300	34.470
Aceh	5.967	4.113	1.853
Sumatera Utara	17.681	12.229	5.453
Sumatera Barat	9.282	3.614	5.668
Riau	5.015	3.160	1.855
Jambi	2.376	1.591	785
Sumatera Selatan	16.617	5.021	11.595
Bengkulu	3.680	1.394	2.286
Lampung	6.800	2.552	4.248
Kepulauan Bangka Belitung	3.791	3.671	120
Kepulauan Riau	3.561	2.955	606
Jawa	67.411	25.758	41.653
Banten	2.546	1.714	832
DKI Jakarta	6.219	5.978	241
Jawa Barat	27.419	5.999	21.420
Jawa Tengah	10.808	3.854	6.954
DI Yogyakarta	1.272	88	1.184
Jawa Timur	19.147	8.126	11.021
Bali – Nusa Tenggara	17.263	5.630	11.633
Bali	2.287	1.700	586
Nusa Tenggara Barat	10.512	2.016	8.496
Nusa Tenggara Timur	4.463	1.914	2.550
Kalimantan	21.757	12.701	9.056
Kalimantan Barat	4.654	2.692	1.961
Kalimantan Tengah	4.472	3.032	1.439
Kalimantan Selatan	7.790	4.794	2.996
Kalimantan Timur	3.886	1.686	2.201
Kalimantan Utara	955	496	459

Lanjutan lampiran 1

Provinsi	Total Perikanan	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya
Sulawesi	40.850	19.376	21.474
Sulawesi Utara	9.174	4.601	4.573
Gorontalo	2.148	1.392	756
Sulawesi Tengah	5.927	3.318	2.609
Sulawesi Selatan	15.606	6.331	9.275
Sulawesi Barat	1.807	797	1.010
Sulawesi Tenggara	6.188	2.937	3.250
Maluku – Papua	20.087	16.812	3.275
Maluku	7.999	5.754	2.245
Maluku Utara	4.158	4.048	110
Papua Barat	4.653	4.431	222
Papua	3.277	2.579	699
Total	242.138	120.577	121.561

Lampiran 2. Jumlah Nelayan menurut Provinsi tahun 2015

Provinsi	Nelayan di Laut	Nelayan di Perairan Umum	Total Nelayan
Sumatera	570.782	126.338	697.120
Aceh	73.122	2.963	76.085
Sumatera Utara	197.016	16.175	213.191
Sumatera Barat	42.061	13.598	55.659
Riau	53.610	14.224	67.834
Jambi	12.864	11.739	24.603
Sumatera Selatan	18.726	53.777	72.503
Bengkulu	21.097	4.707	25.804
Lampung	30.370	9.155	39.525
Kepulauan Bangka Belitung	36.298	-	36.298
Kepulauan Riau	85.618	-	85.618
Jawa	544.869	78.653	623.522
Banten	30.336	662	30.998
DKI Jakarta	27.323	-	27.323
Jawa Barat	98.851	14.990	113.841
Jawa Tengah	154.511	46.114	200.625
DI Yogyakarta	731	2.656	3.387
Jawa Timur	233.117	14.231	247.348
Bali – Nusa Tenggara	191.099	6.328	197.427
Bali	49.471	3.968	53.439
Nusa Tenggara Barat	65.778	2.360	68.138
Nusa Tenggara Timur	75.850	-	75.850
Kalimantan	218.362	174.655	393.017
Kalimantan Barat	61.904	13.516	75.420
Kalimantan Tengah	65.810	30.933	96.743
Kalimantan Selatan	49.542	91.420	140.962
Kalimantan Timur	33.345	36.785	70.130
Kalimantan Utara	7.761	2.001	9.762

Lanjutan lampiran 2

Provinsi	Nelayan di Laut	Nelayan di Perairan Umum	Total Nelayan
Sulawesi	474.593	16.378	490.971
Sulawesi Utara	68.236	138	68.374
Gorontalo	19.348	2.395	21.743
Sulawesi Tengah	44.874	1.328	46.202
Sulawesi Selatan	213.839	10.022	223.861
Sulawesi Barat	57.318	-	57.318
Sulawesi Tenggara	70.978	2.495	73.473
Maluku – Papua	275.434	25.173	300.607
Maluku	94.375	12	94.387
Maluku Utara	19.056	-	19.056
Papua Barat	81.025	1.333	82.358
Papua	80.978	23.828	104.806
Total	2.275.139	427.525	2.702.664

Lampiran 3. Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya menurut Provinsi tahun 2015*)

Provinsi	Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	Mina Padi	Total
Sumatera	14.531	64.720	215.386	17.115	11.366	32.597	355.715
Aceh	382	25.273	13.963	-	142	6.934	46.694
Sumatera Utara	432	2.967	12.728	75	1.384	1.725	19.311
Sumatera Barat	181	227	73.506	1.622	4.106	6.986	86.628
Riau	303	449	24.904	4.010	543	20	30.229
Jambi	-	507	9.897	62	3.483	17	13.966
Sumatera Selatan	-	16.987	31.257	9.421	863	10.294	68.822
Bengkulu	90	139	14.128	42	96	5.923	20.418
Lampung	1.012	17.940	30.478	1.883	745	698	52.756
Kepulauan Bangka Belitung	415	47	1.475	-	4	-	1.941
Kepulauan Riau	11.716	184	3.050	-	-	-	14.950
Jawa	10.731	93.481	598.427	3.263	12.038	89.934	807.874
Banten	1.437	2.542	13.785	520	141	7.095	25.520
DKI Jakarta	576	105	701	-	-	-	1.382
Jawa Barat	324	41.198	254.386	1.322	6.615	46.892	350.737
Jawa Tengah	165	26.897	174.286	587	2.000	3.283	207.218
DI Yogyakarta	-	610	63.522	104	10	5.560	69.806
Jawa Timur	8.199	22.129	91.747	730	3.272	27.104	153.181
Bali - Nusa Tenggara	42.524	8.372	26.077	1.630	932	3.424	82.959
Bali	2.746	132	5.362	-	404	1.100	9.744
Nusa Tenggara Barat	8.209	6.068	16.035	1.630	528	1.766	34.236
Nusa Tenggara Timur	31.569	2.172	4.680	-	-	558	38.979

Provinsi	Laut	Tambak	Kolam	Karamba	Jaring Apung	Mina Padi	Total
Kalimantan	2.489	27.817	57.332	39.618	3.768	401	131.425
Kalimantan Barat	199	6.826	19.520	10.110	2.851	-	39.506
Kalimantan Tengah	10	1.329	8.913	9.758	372	-	20.382
Kalimantan Selatan	243	3.302	4.956	5.259	520	269	14.459
Kalimantan Timur	1.936	13.664	8.194	14.491	25	132	28.442
Kalimantan Utara	101	2.696	15.749	-	-	-	18.546
Sulawesi	77.851	71.365	31.117	439	1.013	30.599	212.384
Sulawesi Utara	3.661	910	9.359	17	656	5.323	19.926
Gorontalo	1.343	1.404	3.400	61	294	7	6.509
Sulawesi Tengah	16.056	4.739	5.213	32	63	17	26.120
Sulawesi Selatan	40.686	49.679	10.269	329	-	11.125	112.088
Sulawesi Barat	2.381	2.995	577	-	-	14.127	20.080
Sulawesi Tenggara	15.674	11.638	2.299	-	-	-	29.611
Maluku – Papua	20.037	677	7.066	-	238	-	28.018
Maluku	14.288	187	179	-	-	-	14.654
Maluku Utara	2.466	194	732	-	55	-	3.447
Papua Barat	2.403	116	2.565	-	1	-	5.085
Papua	880	180	3.590	-	182	-	4.832
Total	168.163	266.432	935.405	935.405	62.065	156.843	1.588.908

*)Tidak termasuk Rumahtangga Pembudidaya Ikan Jaring Tancap (6.241 RT) dan Ikan Hias (8.901 RT)

